

BAB II

EVALUASI PELAKSANAAN RKPD 2010

2.1. Evaluasi Kinerja Pembangunan Daerah

Capaian kinerja pembangunan daerah Tahun 2009 ditinjau dari IPM (indeks pendidikan, indeks kesehatan dan indeks daya beli), jumlah dan laju pertumbuhan penduduk, laju pertumbuhan ekonomi, inflasi, PDRB (adh. konstan), persentase penduduk miskin, jumlah pengangguran, dan investasi (adh. berlaku), dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Jawa Barat diarahkan untuk mencapai kategori maju pada skala yang telah ditetapkan UNDP sebesar 80 pada Tahun 2015. Adapun capaian IPM pada Tahun 2009 meningkat sebesar 0,53 poin dari Tahun 2008, yaitu sebesar 71,50 (angka sangat sementara, hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat, Maret 2010). Bila dibandingkan dengan target IPM Jawa Barat Tahun 2015 yang sebesar 80,00, maka rata-rata capaian setiap tahunnya harus mencapai angka 1,4 poin, dihitung sejak Tahun 2009.

Indeks Pendidikan (IP) pada Tahun 2009 mencapai 80,35 atau meningkat 0,23 poin dibanding tahun 2008. Terdiri dari Angka Melek Huruf (AMH) sebesar 95,60 persen (angka sangat sementara, hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat, Maret 2010) dan Rata-rata Lama Sekolah (RLS) 7,58 tahun (angka sangat sementara, hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat, Maret 2010) pada Tahun 2009.

Peningkatan Indeks Pendidikan tersebut tidak terlepas dari upaya peningkatan Angka Partisipasi Sekolah melalui tuntasnya *Role Sharing* Pendanaan Peningkatan Sarana dan Prasarana Pendidikan Dasar antara Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota, juga dengan adanya kebijakan anggaran pendidikan pemerintah yang berorientasi pada pemenuhan amanat UUD 1945 tentang anggaran pendidikan sebesar minimal 20% dari Total APBD.

Indeks Kesehatan (IK) mencerminkan derajat kesehatan masyarakat suatu wilayah pada periode waktu tertentu yang diukur melalui angka harapan hidup waktu lahir (AHH). Indeks kesehatan Jawa Barat mengalami peningkatan sebesar 0,19 poin, yaitu dari 71,33 pada Tahun 2008 menjadi 71,52 poin pada Tahun 2009. Dari sisi Angka Harapan Hidup (AHH), menunjukkan bahwa rata-rata usia penduduk Jawa Barat adalah 67,91 tahun (angka sangat sementara,

hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat, Maret 2010) meningkat dari Tahun 2008 yaitu 67,80 Tahun.

Indeks daya beli masyarakat Jawa Barat pada Tahun 2009 mencapai 62,40 poin (angka sangat sementara, hasil perhitungan BPS Provinsi Jawa Barat, Maret 2010). Untuk mencapai target sebesar 68 pada Tahun 2015 (dalam rangka mencapai IPM 80 pada Tahun 2015) maka indeks daya beli setiap tahunnya ditargetkan harus meningkat sebesar 0,93 poin, dihitung sejak tahun 2009. Sementara data yang ada masih menunjukkan bahwa rata-rata peningkatan setiap tahunnya baru sebesar 0,30 poin. Lambatnya peningkatan kemampuan daya beli masyarakat Jawa Barat, dipengaruhi pula oleh faktor eksternal Jawa Barat, seperti kenaikan BBM dan inflasi pada kelompok bahan kebutuhan pokok.

Tabel 2.1.
Pencapaian Indikator Pembangunan Jawa Barat
Tahun 2004 – 2009

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
1.	IPM	68,36 ¹⁾	69,35 ¹⁾	70,32 ¹⁾	70,71 ¹⁾	71,12 ¹⁾	71,50
	1) Indeks Pendidikan	79,02 ¹⁾	79,59 ¹⁾	79,94 ¹⁾	80,21 ¹⁾	80,35 ¹⁾	80,58
	2) Indeks Kesehatan	67,23 ¹⁾	69,28 ¹⁾	70,67 ¹⁾	71,00 ¹⁾	71,33	71,52
	3) Indeks Daya beli	58,83 ¹⁾	59,18 ¹⁾	60,34 ¹⁾	60,93 ¹⁾	61,66 ¹⁾	62,40
2.	a. Jumlah penduduk (juta jiwa)	39.140.812	39.960.869	40.737.594	41.483.729	42.194.869	42.693.951
	b. Laju Pertumbuhan Penduduk	2,64	2,10	1,94	1,83	1,70	1,2
3.	Laju Pertumbuhan Ekonomi (%)	4,77	5,62	6,01	6,41	5,83	4,29
4.	Inflasi (%)	7,56	18,51	6,15	5,10	11,11	2,02
5.	PDRB adh Konstan Tahun 2000 (Triliun)	230,00	242,94	257,54	274,18	290,17	302,61
6.	% Penduduk Miskin terhadap total penduduk (BPS)	12,10	12,86	13,39	13,16	12,61	11,67 ²⁾
7.	Jumlah Pengangguran (jiwa)	2.319.715	2.692.226	2.561.525	2.386.214	2.263.584	2.080.697
	Jumlah Pengangguran (%)	13,69	15,53	14,59	13,08	12,08	10,96

NO	INDIKATOR	PENCAPAIAN					
		2004	2005	2006	2007	2008	2009
8.	Investasi adh berlaku (triliun Rp)	40,52	63,62	75,64	87,50	107,93	118,65 ³⁾

Sumber : Bappeda dan BPS Provinsi Jawa Barat Tahun 2009

Keterangan: 1) Angka Jawa Barat

2) Kondisi Presentase Penduduk Miskin bulan Maret Tahun 2009

3) Angka Investasi untuk Tahun 2009 hasil penjumlahan dari triwulan I-IV (sumber : Berita Resmi Statistik, 2009)

2. Jumlah penduduk pada Tahun 2009 sebesar 42.693.951 jiwa yang terdiri dari 21.512.996 jiwa penduduk laki-laki dan 21.180.955 jiwa penduduk perempuan, dengan *sex ratio* sebesar 101,6, artinya setiap 1.000 jiwa penduduk perempuan terdapat 1.016 jiwa penduduk laki-laki, dengan kepadatan penduduk mencapai 1.458 jiwa per kilometer persegi. Berdasarkan struktur umur penduduk Tahun 2009, komposisi penduduk usia 14 tahun kebawah mencapai 29,12%, penduduk usia produktif 15-64 tahun sebesar 65,55%, sementara penduduk usia di atas 64 tahun sebesar 5,33%. Dengan angka beban ketergantungan yang menurun dari tahun sebelumnya, dari 54,19 pada Tahun 2008 menjadi 52,55 pada Tahun 2009, hal ini menunjukkan bahwa Tahun 2009 untuk setiap 100 penduduk usia produktif di Jawa Barat menanggung sekitar 53 penduduk usia tidak produktif.

Laju Pertumbuhan Penduduk (LPP) di Provinsi Jawa Barat dari tahun ke tahun relatif terus menurun. Pada periode 2008-2009, LPP Provinsi Jawa Barat mencapai 1,2 persen. Kondisi tersebut menunjukkan upaya pengendalian pertumbuhan penduduk di Provinsi Jawa Barat relatif cukup baik.

3. Laju Pertumbuhan Ekonomi, Berdasarkan variabel pembentuk PDRB Jawa Barat dari sisi permintaan, karakteristik ekonomi daerah Jawa Barat identik dengan nasional yakni *domestic-demand led growth*. Hal ini tercermin dari tingginya kontribusi konsumsi swasta yang mencapai sekitar 65% terhadap total PDRB Jawa Barat dibandingkan dengan variabel lainnya. Hal ini diyakini merupakan salah satu penyebab lebih kuatnya daya tahan perekonomian terhadap kejutan eksternal belakangan ini, dibandingkan dengan daerah yang sangat tergantung pada ekspor.

Dampak krisis ekonomi global terus berlanjut sampai triwulan II Tahun 2009, sehingga selama triwulan tersebut, laju pertumbuhan ekonomi terus melambat. Publikasi dari Bank Indonesia Bandung menyatakan bahwa di sisi permintaan, perlambatan terutama disebabkan oleh kelesuan investasi serta masih turunnya kinerja ekspor. Rendahnya angka realisasi investasi di Jawa Barat, terutama Penanaman Modal Asing (PMA), merupakan indikasi dari belum pulihnya kondisi perekonomian global. Selain itu, sikap *wait-and-see* investor terkait penyelenggaraan Pilpres 2009 yang menyebabkan mereka menahan diri untuk merealisasikan investasinya di triwulan II-2009.

Pemulihan pertumbuhan ekonomi mulai terjadi pada Triwulan III Tahun 2009. Perekonomian Jawa Barat diperkirakan semakin menunjukkan perbaikan, seiring dengan pulihnya perekonomian global. Dengan perkembangan tersebut, perekonomian Jawa Barat selama Tahun 2009 masih mampu tumbuh sebesar antara 4,29%, walaupun lebih lambat dibandingkan pertumbuhan Tahun 2008 yang mencapai angka sebesar 5,8%.

Konsumsi rumah tangga yang tumbuh relatif stabil masih menjadi penggerak utama perekonomian Jawa Barat pada Tahun 2009. Pangsa konsumsi rumah tangga pada Tahun 2009 diperkirakan sebesar 66% dari PDRB Jawa Barat, meningkat dibandingkan pangsa pada Tahun 2008 yang sebesar 61% (Bank Indonesia Bandung, 2009).

Di samping itu, perekonomian Jawa Barat ditopang oleh ekspor, impor, serta Pembentukan Modal Tetap Bruto (PMTB) yang tercermin dari investasi. Adapun pangsa ekspor terhadap perekonomian Jawa Barat sedikit menurun dibandingkan kondisi Tahun 2008, akibat pengaruh krisis keuangan global, yang menyebabkan turunnya permintaan luar negeri secara tajam, khususnya pada semester I-2009. Demikian juga halnya dengan investasi, yang didominasi oleh investasi Penanaman Modal Asing (PMA), yang mengalami penurunan pangsa dibandingkan Tahun 2008 (Bank Indonesia Bandung, 2009).

Inflasi, Tahun 2009 adalah sebesar 2,02%, jauh lebih rendah dari inflasi Tahun 2008 yang mencapai 11,11%. Melemahnya kinerja pertumbuhan ekonomi pada Tahun 2008 disertai dengan tingginya inflasi, yang berimplikasi negatif pada rendahnya daya beli masyarakat. Oleh karena itu kebijakan stimulus fiskal diharapkan dapat meminimalisasi penurunan daya beli masyarakat.

Sejalan dengan perlambatan pertumbuhan ekonomi Jawa Barat sampai pertengahan Tahun 2009 dan melemahnya tekanan eksternal (harga komoditas strategis di pasar internasional serta inflasi negara mitra dagang utama), inflasi tahunan Jawa Barat menunjukkan tren penurunan yang cukup dalam sampai triwulan III Tahun 2009. Penurunan harga BBM yang diikuti dengan penyesuaian tarif angkutan dalam dan luar kota semakin meredam laju inflasi Jawa Barat. Namun demikian, meningkatnya persepsi risiko investor di pasar keuangan menyebabkan kenaikan harga emas di pasar internasional yang selanjutnya memberi tekanan inflasi tahunan kelompok sandang. Pada triwulan II yang masih terus turun disebabkan oleh relatif terjaganya pasokan bahan makanan, hilangnya pengaruh kenaikan harga BBM pada triwulan yang sama tahun sebelumnya, serta pelemahan tekanan eksternal melalui apresiasi nilai tukar, penurunan inflasi negara mitra dagang utama, dan harga komoditas strategis di pasar internasional. Namun demikian, kenaikan harga minyak tanah sebagai dampak dari berlangsungnya program konversi minyak tanah ke gas elpiji, memberikan sumbangan inflasi pada beberapa kota di Jawa Barat.

Trend inflasi mulai naik di triwulan 4 Tahun 2009, kenaikan tersebut terutama disebabkan oleh faktor teknis, yakni hilangnya pengaruh penurunan harga BBM dalam perhitungan inflasi pada periode pengamatan (*base-effect*). Selain itu, kenaikan harga emas di pasar internasional mendorong naiknya ekspektasi pedagang atas harga emas perhiasan di Jawa Barat. Kenaikan harga air kemasan yang cukup tinggi terutama di Kota Bekasi pada triwulan IV-2009 turut menyumbangkan inflasi pada kelompok makanan jadi, minuman, rokok, dan tembakau. Sekalipun demikian, dibanding tahun sebelumnya pencapaian inflasi Tahun 2009 jauh lebih rendah. Dalam sepuluh tahun terakhir, baru tahun ini terjadi inflasi begitu rendah yakni 2,02%.

- 4. Proporsi penduduk miskin** di Jawa Barat masih menunjukkan angka yang tinggi. Menggunakan batasan konsumsi penduduk mencapai 2100 kalori setiap harinya, tercatat proporsi penduduk yang di bawah batasan tersebut sebesar 11,67% pada Tahun 2009. Kemiskinan di Jawa Barat ditengarai sebagai akibat dari kepemilikan sumberdaya yang tidak merata, kemampuan antara penerimaan dan pengeluaran yang tidak seimbang, serta ketidaksamaan kesempatan berusaha yang dimiliki oleh penduduk Jawa Barat.

5. **Jumlah pengangguran**, pada Tahun 2009 mengalami penurunan sebesar 8,08% dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu dari sebanyak 2.263.584 orang pada Tahun 2008, menjadi sebesar 2.080.697 orang pada Tahun 2009. Presentase jumlah penganggur terhadap angkatan kerja atau Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) pada Tahun 2008 adalah sebesar 11,18% dan Tahun 2009 sebesar 10,96% ini menunjukkan penurunan TPT di provinsi Jawa Barat.
6. **Jumlah Investasi**, Sekalipun laju pertumbuhan ekonomi melambat pada Tahun 2008, realisasi investasi PMA dan PMDN pada Tahun 2008 naik 60,38% dibandingkan Tahun 2007. Secara keseluruhan realisasi investasi Jawa Barat rata-rata tumbuh diatas 12% per tahun (Bank Indonesia Bandung, 2009). Peningkatan investasi terutama didorong oleh komponen non bangunan. Salah satu komponen non bangunan yang meningkat yaitu barang modal, seperti mesin industri dan perlengkapannya serta mesin industri khusus. Meskipun investasi meningkat, namun pertumbuhan secara tahunan mengalami perlambatan, terutama terjadi pada investasi bangunan. Perlambatan laju pertumbuhan investasi juga tercermin dari penurunan jumlah penyaluran kredit baru untuk penggunaan investasi oleh bank umum di Jawa Barat (Bank Indonesia Bandung, 2008).

Seiring dengan pulihnya krisis ekonomi global, realisasi investasi pun mulai meningkat lagi di pertengahan Tahun 2009. Dilihat dari sektor ekonomi bidang usahanya, mayoritas investasi di Jawa Barat selama Tahun 2009 direalisasikan pada sektor sekunder, dengan pangsa sebesar 72,2%. Sementara itu, bila dilihat lebih detail dalam subsektornya, investasi paling besar direalisasikan pada subsektor listrik, gas, dan air, dengan pangsa 14,6% dari keseluruhan realisasi. Kondisi ini menunjukkan tingginya potensi investasi pada subsektor listrik, gas, dan air, khususnya listrik, di Jawa Barat (Bank Indonesia Bandung, 2009).

Investasi Tahun 2009 mencapai Rp. 118,65 Triliun meningkat dari Tahun 2008 yaitu sebesar Rp. 107,93 Triliun. Selain subsektor listrik, subsektor industri logam, mesin, dan elektronik serta subsektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain juga mencatat realisasi investasi yang tinggi selama Tahun 2009. Realisasi investasi pada subsektor industri logam, mesin, dan elektronik tercatat sebesar Rp.4,3 Triliun (pangsa 14,2%), sementara realisasi pada subsektor industri kendaraan bermotor dan alat transportasi lain tercatat bernilai Rp.4,2 Triliun (pangsa 14,0%). Peningkatan pada subsektor tersebut

terrealisasi karena besarnya potensi yang besar terhadap pasar kendaraan bermotor di Indonesia.

2.2. Evaluasi Pelaksanaan Kebijakan Dan Program RKPD Tahun 2010

Rencana Kerja Pemerintah Daerah, merupakan skenario pembangunan yang diaktualisasikan dalam kebijakan dan program tahunan, guna memanfaatkan seluruh sumber daya pembangunan di daerah, dengan tetap memperhatikan konsistensi perencanaan jangka menengah dan jangka panjang. Oleh karena itu, evaluasi kinerja kebijakan dan program, merupakan bagian penting untuk menilai pencapaian program dan kegiatan terhadap tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, dari pemanfaatan sumber daya pembangunan, yang pada gilirannya menjadi bahan masukan bagi penyusunan rencana kebijakan dan program selanjutnya.

2.2.1 Evaluasi Implementasi Rencana Kerja dan Pendanaan Tahun 2010 terhadap APBD 2010

Dalam hal evaluasi terhadap rencana kerja Tahun 2010, fokus penilaian kinerja kebijakan dan program pembangunan Tahun 2010 adalah pada penilaian rencana dan implementasi, yang didukung oleh sumber dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Provinsi Jawa Barat.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2010 diarahkan untuk mendukung pencapaian target IPM 80, dimana dengan mempertimbangkan pencapaian IPM Tahun 2008 baru sebesar 71,12, diperlukan perencanaan kegiatan-kegiatan yang berorientasi pencapaian IPM 80. Dengan perencanaan anggaran yang konsisten dan fokus, diproyeksikan pencapaian IPM 80 ditargetkan tercapai pada Tahun 2015. Perencanaan pembangunan yang mendukung pencapaian IPM 80 diarahkan untuk memperkuat bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur, dan suprastruktur.

Kebijakan belanja daerah Tahun 2010 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif, antara lain melalui:

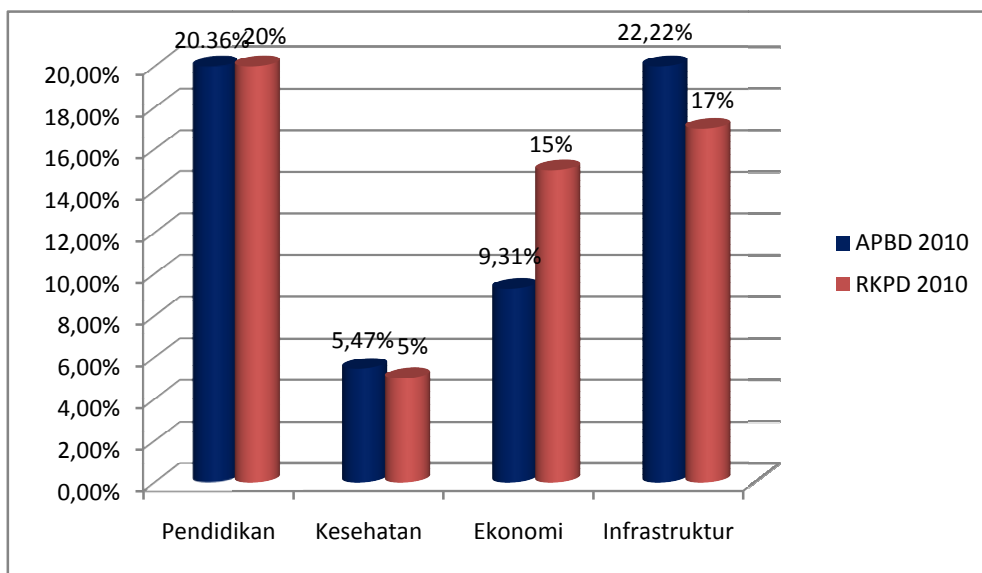
1. Mengalokasikan anggaran untuk pendidikan sebesar 20% dari total belanja daerah Tahun 2010 tidak termasuk alokasi anggaran untuk kegiatan yang belum selesai tahun sebelumnya (*multiyears*), dalam rangka peningkatan indeks

pendidikan meliputi Angka Melek Huruf dan Rata-rata Lama Sekolah (AMH dan RLS).

2. Mengupayakan alokasi anggaran untuk kesehatan sebesar 5% dari total belanja daerah untuk peningkatan kualitas dan aksesibilitas pelayanan dasar kesehatan dalam rangka peningkatan indeks kesehatan masyarakat.
3. Untuk mendukung percepatan pembangunan diupayakan, pada 2010, akan di alokasi anggaran untuk bidang infrastruktur dan lingkungan hidup sebesar 17,5% serta untuk bidang ekonomi sebesar 15%.

Memperhatikan kebijakan pembangunan daerah di Jawa Barat pada Tahun 2010, maka diindikasikan proporsi alokasi anggaran yang di bagi menurut empat kelompok utama pembangunan sebagaimana grafik dibawah ini.

Grafik 2.1.
Empat Kelompok Utama Pembangunan Dalam APBD 2010



* Sumber : Hasil olahan Bappeda Tahun 2010

* Alokasi dana termasuk Bansos dan Hibah

Melihat Kebijakan Belanja Daerah Tahun 2010 yang diantaranya memuat empat Kelompok utama pembangunan dan alokasi anggaran pada APBD 2010 maka dapat ditarik kesimpulan bahwa :

1. Pendidikan

Realisasi dana pada APBD 2010 untuk kelompok bidang pendidikan sudah melampaui dari yang direncanakan dalam RKPD 2010 yaitu sebesar 20,36%, dari

rencana alokasi sebesar 20%. Angka tersebut sudah termasuk hitungan bantuan sosial, hibah, dan subsidi.

2. Kesehatan

Realisasi dana pada APBD 2010 untuk fungsi kesehatan telah sesuai dengan apa yang di arahkan oleh RKPD 2010 yaitu diupayakan sebesar 5%. Grafik 2.1. di atas menunjukkan 5,47%, angka ini adalah hasil dari upaya untuk mencapai 5%.

3. Ekonomi

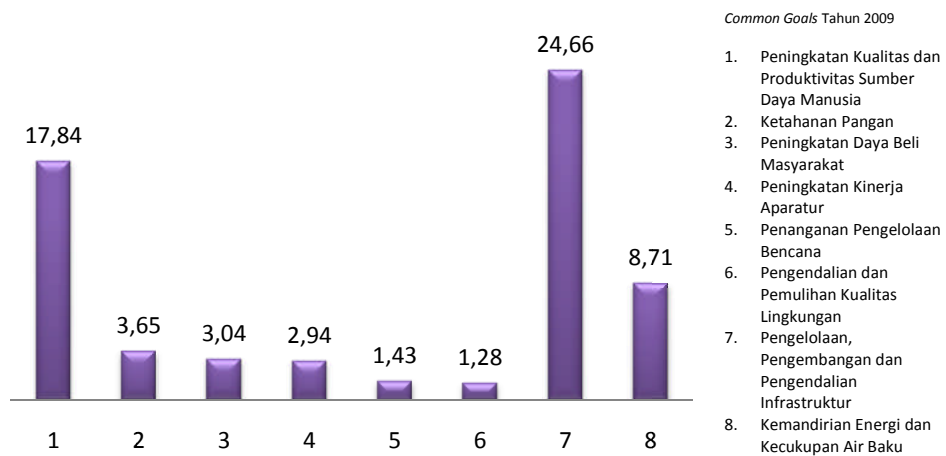
Realisasi dana pada APBD Tahun 2010 untuk kelompok bidang ekonomi sebagaimana yang tertuang dalam RKPD Tahun 2010, hanya sebesar 9,31% dari rencana alokasi sebesar 15%.

4. Infrastruktur

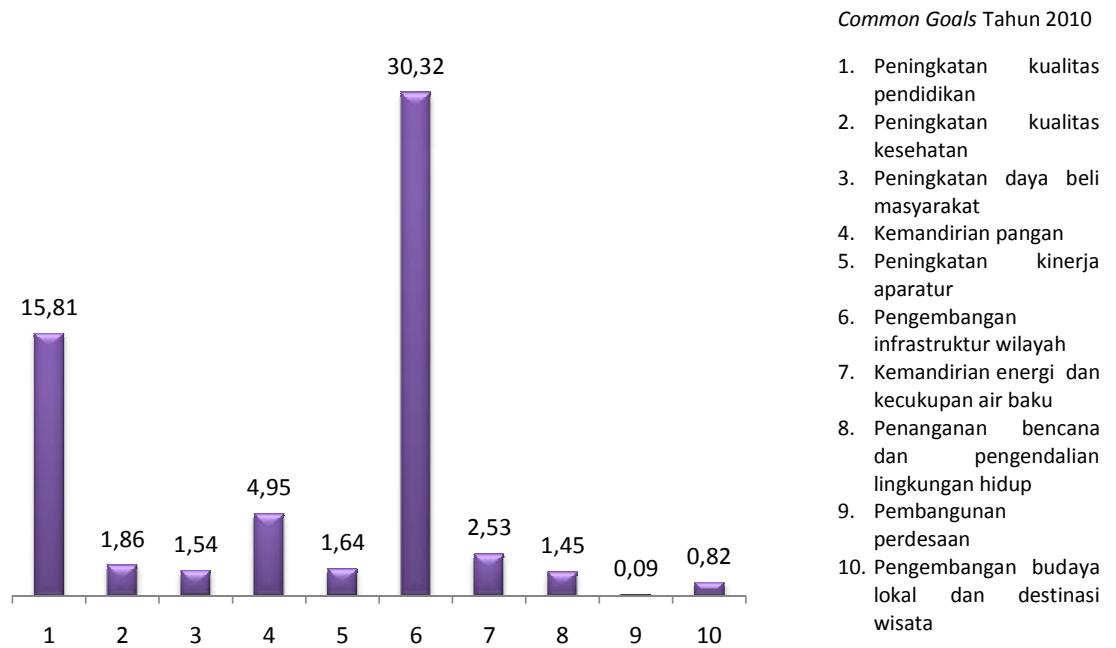
Realisasi dana pada APBD 2010 untuk kelompok bidang infrastruktur sudah melampaui dari yang direncanakan dalam RKPD 2010 yaitu sebesar 22,22%, dari rencana alokasi sebesar 17%.

Adapun proporsi alokasi anggaran setiap *common goals* tahun 2009 dan *common goals* tahun 2010, sebagaimana grafik dibawah ini :

Grafik 2.2.
Alokasi Pendanaan *Common Goals* Tahun 2009
yang bersumber dana dari APBD Provinsi Tahun 2009



Grafik 2.3.
Alokasi Pendanaan Common Goals Tahun 2010
yang bersumber dana dari APBD Provinsi Tahun 2010



Pencapaian *Common Goals* membutuhkan sinergitas lintas bidang dan OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, antar tingkatan pemerintahan baik pusat, kabupaten/kota maupun desa/kelurahan, dan antar pelaku pembangunan baik pemerintah, dunia usaha maupun masyarakat, serta perwilayahan pembangunan.

Ciri utama dari sinergitas tersebut sebagai berikut :

1. Tingginya komitmen kebersamaan lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi.
2. Perencanaan program/kegiatan terpilih dibuat secara bersama-sama seluruh OPD yang terlibat berdasarkan prinsip *SMART PLANNING* dan bersifat akselerasi pencapaian sasaran yang telah ditetapkan.
3. Program dan kegiatan terpilih dilaksanakan berdasarkan prinsip *SHEWHART Cycle (Plan, Do, Check, Action)*.
4. Melibatkan secara aktif lintas OPD di lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, OPD di lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota, Pemerintah Pusat serta segenap pelaku pembangunan lain termasuk masyarakat sebagai mitra strategis sejak tahap perencanaan hingga pelaksanaan, monitoring dan evaluasi.

2.2.2 Evaluasi Pembangunan Daerah Tahun 2010

Evaluasi kebijakan dan program pembangunan Tahun 2010, merupakan penilaian capaian target terhadap realisasi rencana pembangunan tahunan daerah, dalam konteks RPJM Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008-2013, dalam lingkup pembangunan sosial, ekonomi, tata ruang, infrastruktur, penanganan bencana. Adapun hasil evaluasi tersebut dituangkan berdasarkan capaian kinerja kebijakan dan program dalam setiap isu strategis yang telah ditetapkan.

1. Penanggulangan Penduduk miskin dan Pengangguran

Permasalahan yang dihadapi dalam penanggulangan penduduk miskin dan pengangguran antara lain tingkat pendidikan rata-rata masyarakat yang masih rendah; akses terhadap pelayanan kesehatan masih kurang; pendapatan yang rendah; kurangnya tingkat kompetensi tenaga kerja, krisis ekonomi global yang menimbulkan pemutusan hubungan kerja; rendahnya nilai tukar produk pertanian dan fluktuasi harga produk pertanian, serta akses terhadap potensi permodalan sulit diperoleh usaha kecil dan usaha mikro.

2. Kinerja Pemerintah Daerah dan Desa

Permasalahan yang dihadapi bidang pemerintahan daerah dan pembangunan desa antara lain; belum optimalnya implementasi *Good Governance* dan *Clean Government*, belum sinergisnya implementasi pendekatan *top down* dan *bottom up* dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan, kualitas dan kuantitas SDM serta sarana prasarana aparatur masih perlu ditingkatkan, masih lemahnya peran desa sebagai pemerintah otonom dan sebagai subjek pembangunan, perlu optimalisasi fokus desa membangun dimana masyarakat desa dijadikan sebagai subyek pembangunan desa, masih dirasakan rendahnya keterlibatan masyarakat perdesaan dalam kegiatan ekonomi produktif berbasis sumber daya lokal, rendahnya kemampuan mengakses berbagai potensi daerah kesempatan berusaha, lemahnya sumber daya modal usaha, terbatasnya akses pada pasar dan informasi pasar, rendahnya tingkat partisipasi masyarakat dalam penetapan kebijakan pembangunan, kurangnya ahli yang merepresentasikan orang

miskin, serta keterbatasan ruang publik. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui kebijakan dan program sebagai berikut :

- a. Peningkatan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam dan implementasi pembangunan, melalui berbagai jenis program peningkatan partisipasi masyarakat, dengan sasaran terwujudnya kemitraan pemerintah, swasta, dan masyarakat dalam pembangunan secara proporsional.

Berdasarkan hasil evaluasi perencanaan terhadap implementasi kegiatan Tahun 2010, kegiatan yang dilaksanakan dalam rangka peningkatan partisipasi dan peran kelembagaan masyarakat dalam pembangunan adalah melalui: peningkatan pemberdayaan masyarakat dan partisipasi pemerintahan desa yang dilakukan secara intensif untuk meningkatkan pembangunan perdesaan secara partisipatif serta pendayagunaan teknologi tepat guna.

- b. Mewujudkan Desa Membangun sesuai dengan otonomi yang dimilikinya, yang dilaksanakan melalui Program Pemantapan Pemerintahan dan Pembangunan Desa, dengan sasaran meningkatnya kapasitas dan kompetensi pelayanan yang diberikan pemerintahan desa bersama pemerintahan kabupaten dan kota dalam rangka penguatan layanan publik dan daya saing desa.

3. Ketersediaan dan Kualitas Infrastruktur Wilayah

Permasalahan yang dihadapi dalam penyediaan infrastruktur wilayah antara lain masih kurangnya kualitas pelayanan infrastruktur wilayah yang ditandai dengan rendahnya tingkat kemantapan jalan dan kondisi jaringan irigasi, serta jumlah sarana dan prasarana yang tersedia. Sehingga untuk meningkatkan ketersediaan dan kualitas infrastruktur wilayah, pada tahun 2011 perlu dioptimalkan beberapa hal sebagai berikut: (a) pengembangan infrastruktur strategis yang telah direncanakan pada tahap sebelumnya, seperti bandara, pelabuhan laut, jalan tol, jalur kereta api, dan waduk strategis (b) penuntasan penanganan jalan dan peningkatan status jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional, (c) pembangunan jalan poros tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya, (d) pengembangan sistem transportasi dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah, (e) rehabilitasi daerah irigasi strategis, (f) optimalisasi fungsi situ dan waduk sebagai infrastruktur penyedia air baku dan pengendali banjir, dan (g) sistem pengelolaan,

kualitas, kuantitas dan kontinuitas ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan rumah tangga, pertanian dan industri.

Perkembangan pelaksanaan pembangunan bandara, pelabuhan laut, jalan tol, jalur kereta api, dan waduk-waduk strategis sebagian besar baru mencapai tahap perencanaan, perancangan, dan pembebasan lahan, antara lain pada pembangunan Bandara Internasional Jawa Barat di Kertajati Majalengka, pembangunan Jalan Tol Cisumdawu, Jalan Tol Soroja dan Jalan Tol Dalam Kota Bandung (BIUTR), reaktivasi beberapa jalur kereta api, serta pembangunan beberapa waduk strategis seperti Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang dan Waduk Sadawarna di Kabupaten Subang.

Dalam upaya penuntasan penanganan jalan dan peningkatan status jalan lintas selatan Jawa Barat menjadi jalan nasional, berdasarkan Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 630/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Dalam Jaringan Jalan Primer Menurut Fungsinya sebagai Jalan Arteri dan Jalan Kolektor 1 (satu) serta Keputusan Menteri Pekerjaan Umum No. 631/KPTS/M/2009 tentang Penetapan Ruas-Ruas Jalan Menurut Statusnya Sebagai Jalan Nasional, dari total 421,17 Km panjang jalan lintas selatan Jabar, ruas jalan provinsi sepanjang 155 Km telah berubah status menjadi jalan nasional. Sedangkan 210, 93 Km panjang jalan non status telah berubah menjadi jalan strategis nasional. Sehingga dengan adanya perubahan status tersebut diharapkan penuntasan jalan lintas selatan Jabar dapat diselesaikan pada akhir tahun 2011.

Selain itu, salah satu indikator keberhasilan penanganan infrastruktur jalan adalah tingkat kemantapan jalan khususnya pada jalan provinsi. Sampai dengan tahun 2009, tingkat kemantapan jalan provinsi sepanjang 2.199,18 km telah mencapai 89,50% (kondisi baik dan sedang). Dengan tingkat kemantapan tersebut, 73,88% dari panjang jaringan jalan provinsi masih berada pada kondisi sedang dan 10,50% berada pada kondisi rusak ringan dan rusak berat, yang disebabkan antara lain oleh beban lalu lintas yang sering melebihi standar muatan sumbu terberat (MST), tingginya frekuensi bencana alam, serta belum optimalnya penanganan jalan provinsi.

Pada pembangunan jalan poros tengah Bandung-Pangalengan-Rancabuaya, saat ini telah mencapai tahap pembebasan tanah dan pembangunan fisik, dan diharapkan dapat tuntas pada akhir tahun 2013. Sedangkan pengembangan sistem

transportasi regional dan perkotaan dalam mendukung aksesibilitas antar wilayah saat ini belum dilaksanakan, karena masih berada pada tahap studi pengembangan sistem transportasi antar moda secara terintegrasi.

Rehabilitasi daerah irigasi strategis dilakukan untuk memperbaiki kondisi jaringan irigasi pada daerah irigasi yang memberikan kontribusi tinggi dan mengalami kerusakan berat. Rehabilitasi daerah irigasi yang telah dilakukan diharapkan dapat meningkatkan intensitas tanam padi yang selanjutnya akan mendukung ketahanan pangan. Kinerja rehabilitasi daerah irigasi strategis pada tahun 2009 menghasilkan jaringan irigasi dengan kondisi baik sebesar 60,76%, serta penurunan kerusakan jaringan irigasidimana kondisi rusak ringan menjadi 25,56% dan kondisi rusak berat menjadi 13,69%. Dengan adanya perbaikan kondisi jaringan irigasi pada daerah irigasi strategis telah berdampak terhadap peningkatan intensitas tanam pada tahun 2009 menjadi 194%. Berdasarkan hal tersebut serta pencapaian target pembangunan tahun berikutnya, rehabilitasi daerah irigasi masih perlu dilakukan pada daerah irigasi strategis lain yang perlu ditangani dengan segera dan hal tersebut menjadi prioritas utama.

Optimalisasi fungsi situ dan waduk sebagai infrastruktur penyedia air baku dan pengendali banjir dilakukan melalui perencanaan dan pembangunan waduk, meliputi pembangunan Waduk Lapangan Sindang Pano di Kabupaten Majalengka, pembangunan Waduk Lapangan Legok Nangka di Kabupaten Garut, dukungan pembebasan lahan untuk relokasi penduduk dari pembangunan Waduk Jatigede di Kabupaten Sumedang, serta dukungan pembebasan lahan Bendung Leuwi Goong di Kabupaten Garut. Mengingat keragaman aktivitas pembangunan yang semakin meningkat, serta berimplikasi pada meningkatnya jumlah kebutuhan air baku. Oleh karena itu, optimalisasi fungsi situ dan waduk perlu lebih ditingkatkan, terutama yang bersifat strategis dalam rangka mengatasi kekeringan di musim kemarau dan kelebihan air (banjir) di musim hujan.

Manajemen pengelolaan ketersediaan air baku untuk menunjang kegiatan pertanian secara tidak langsung dilakukan melalui kegiatan operasional dan pemeliharaan jaringan irigasi, serta pemberdayaan petani pemakai air. Dalam hal ini pengelolaan yang dilakukan perlu ditingkatkan melalui penyediaan dana OP yang sesuai dengan angka kebutuhan nyata OP irigasi serta peningkatan peran masyarakat dalam memelihara jaringan irigasi.

Pelayanan infrastruktur lingkungan permukiman ditinjau dari pelayanan perumahan, cakupan pelayanan persampahan, pengolahan air limbah, dan cakupan pelayanan air bersih/air minum. Cakupan pelayanan perumahan dari Tahun 2007-2009 meningkat dari 90,64% menjadi 93,92%, yang dilakukan melalui pembangunan hunian formal, hunian vertikal (rusunami, rusunawa), kawasan siap bangun (kasiba) dan lingkungan siap bangun (lisiba).

Cakupan pelayanan persampahan dari Tahun 2007-2009 meningkat dari 53% menjadi 54%. Jumlah penduduk Jawa Barat dan aktivitas yang semakin meningkat berimplikasi pada tuntutan peningkatan pelayanan persampahan yang harus disediakan, mengingat semakin sulitnya mencari lahan untuk Tempat Pengolahan dan Pemrosesan Akhir Sampah (TPPAS), penerapan pengolahan sampah yang berbasis teknologi, hemat lahan, dan ramah lingkungan harus segera diwujudkan. Rencana penyediaan TPA regional di 4 (empat) lokasi yang direncanakan Pemerintah Provinsi Jawa Barat, meliputi TPA Regional di Metro Bandung (Rencana TPA Legok Nangka, Sarimukti, dan Leuwigajah) dan Metro Bodebek (Rencana TPA Nambo), masih belum memberi implikasi terhadap pelayanan persampahan yang dibutuhkan, disamping itu seluruh TPA yang ada belum memiliki teknik sistem pengolahan *sanitary landfill* maupun teknologi pengelolaan sampah yang lebih bernilai ekonomi.

Cakupan pelayanan air limbah di Jawa Barat dari Tahun 2007-2009 meningkat dari 49,01% menjadi 51,8%, yang dilakukan melalui pembangunan jaringan pipa air limbah domestik di perkotaan. Cakupan pelayanan air minum perpipaan di Jawa Barat Tahun 2007-2009 meningkat dari 30% menjadi 32,7%, sedangkan pelayanan air minum Tahun 2009 sebesar 48,4%. Kurangnya debit air permukaan dan kapasitas produksi dari bangunan pengolah air bersih menjadi dasar masih perlunya meningkatkan kualitas daerah resapan air sebagai sumber air baku utama, serta peningkatan kapasitas produksi air bersih di setiap bangunan pengolah air bersih yang telah ada. Dalam hal air disediakan melalui proses investasi dan *cost recovery*, maka diperlukan pertimbangan aspek keterjangkauan masyarakat untuk membayar retribusi.

4. Intensitas Bencana Alam, Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan

Permasalahan yang dihadapi dalam intensitas bencana alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan antara lain: kekeringan, banjir, tanah longsor, pencemaran dan kerusakan lingkungan, merupakan kejadian yang rutin terjadi di

Jawa Barat sedangkan gempa bumi, letusan gunung api, dan angin ribut merupakan bencana alam yang dapat terjadi insidental; penanganan bencana alam, pencemaran dan kerusakan lingkungan cenderung dilakukan secara kuratif; implementasi rencana tata ruang wilayah belum konsisten; pengawasan, penegakan hukum dalam bidang pencemaran dan kerusakan lingkungan belum optimal; rendahnya kepedulian dan peran serta masyarakat, pelaku usaha dan komitmen pemerintah dalam pelestarian lingkungan; belum adanya penanganan bencana alam dan pencemaran secara totalitas dan komprehensif.

Ditinjau dari aspek geologi, Provinsi Jawa Barat terletak pada jalur tumbukan (subduksi) 2 lempeng dari 5 lempeng utama yang ada di dunia. Hal ini berimplikasi pada kondisi Jawa Barat yang memiliki jalur vulkanik aktif yang ditandai dengan banyaknya gunung api, daerah patahan dan rentan akan kejadian bencana alam geologi terutama kejadian longsor/gerakan tanah, gempa bumi, dan bahaya letusan gunungapi. Berdasarkan data empiris, intensitas kejadian bencana alam geologi di Jawa Barat Jawa Barat tertinggi di Indonesia.

Intensitas kejadian bencana longsor selama Tahun 2008 terjadi 80 kali kejadian yang mengakibatkan 36 orang meninggal, 21 luka, 219 rumah hancur dan kerusakan pada infrastruktur transportasi dan lahan pertanian. Sedangkan, intensitas kejadian bencana longsor selama Tahun 2009 terjadi 65 kali kejadian yang mengakibatkan 74 orang meninggal, 35 luka, 31 rumah hancur, 364 rumah rusak, dan kerusakan pada infrastruktur transportasi dan lahan pertanian. Untuk menanggulangi gempa tersebut, berbagai upaya telah dilakukan dan pada awal Tahun 2010 sudah memasuki tahapan rehabilitasi dan rekonstruksi dengan telah dan sedang dilakukan upaya pemulihan berupa perbaikan maupun pembangunan kembali pemukiman dan fasilitas umum penduduk yang terkena dampak gempa

Penanganan bencana alam berupa program mitigasi bencana sudah dilakukan namun belum diterapkan secara menyeluruh, karena cenderung pada taraf perencanaan yang bersifat kuratif, dan bersifat penanganan setempat. Penanganan yang dilakukan seperti identifikasi kawasan rawan bencana, tanggap darurat untuk kejadian bencana alam yang mengakibatkan gangguan serta kerusakan jalan dan jembatan, serta pemantauan dan penanggulangan banjir dan kekeringan. Namun, penanganan tersebut belum dapat menangani intensitas bencana alam yang semakin hari semakin tidak dapat diprediksi, karena saat ini bencana alam cenderung dipengaruhi oleh perubahan iklim yang berdampak

terhadap komponen penting, seperti tidak menentukannya cuaca, kesehatan, kematian, pertanian, kerusakan infrastruktur, dan ketersediaan air. Pencemaran yang terjadi di Jawa Barat, diantaranya ditinjau dari pencemaran air dan udara. Hasil monitoring kualitas air sungai (melalui Prokasih) di 7 DAS utama pada Tahun 2009 menunjukkan indikasi tercemar berat. Salah satu permasalahan pencemaran yang mencuat pada Tahun 2009 adalah kasus pencemaran Sungai Cilamaya di Kabupaten Karawang yang secara umum menunjukkan nilai parameter BOD melebihi baku mutu (BM Kelas II). Permasalahan tingginya nilai parameter BOD secara umum juga terjadi pada aliran sungai di beberapa kabupaten/kota diantaranya Kabupaten Cirebon, Kota Depok, Kota Banjar, Kabupaten Karawang, dan Kabupaten Sukabumi.

Pengendalian pencemaran air dilakukan melalui Program Kali Bersih (Prokasih) dan Surat Pernyataan Program Kali Bersih (Superkasih) yang melakukan pembinaan terhadap 74 industri di Jawa Barat sebagai upaya pengendalian terhadap sumber pencemar khususnya air limbah industri, Program EPCM (pemberian sertifikat kepada perorangan), pengembangan produksi bersih untuk industri kecil dan menengah (masih dilakukan sosialisasi dan pilot project) serta pengembangan IPAL terpadu di beberapa kluster industri (ditawarkan investasi untuk pembangunan IPAL terpadu di Rancaekek dan Majalaya). Upaya lainnya adalah melaksanakan monitoring dan pengawasan terhadap pengelolaan limbah yang dilakukan oleh industri, terutama industri tekstil, yang mayoritas tersebar di wilayah tengah dan barat Jawa Barat, yaitu wilayah Bandung, Bekasi, Karawang, dan Purwakarta.

Kualitas udara ditinjau dari pengujian kualitas udara perkotaan terhadap parameter CO dan PM10. Pada Tahun 2009, khususnya di kota-kota besar kualitas udara cenderung menurun, sedangkan di beberapa daerah terdapat peningkatan kualitas udara yang semakin membaik. Uji parameter terhadap PM 10 di Kabupaten Bekasi berada diatas ambang batas, selanjutnya Kota Depok dan Kota Bandung. Sedangkan parameter karbonmonoksida pada umumnya masih berada dibawah ambang batas yang ditetapkan.

Terkait dengan kerusakan lingkungan di Jawa Barat, diantaranya ditinjau dari kondisi lahan kritis. Lahan kritis di Jawa Barat seluas 580.397 ha, dan sekitar 69,35% atau seluas 402.528 ha berada di lahan milik masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, diantaranya melalui program GRLK, GERHAN, dan program lainnya, sehingga pada akhir Tahun 2009 tersisa lahan kritis di lahan milik masyarakat yang belum tertangani seluas 143.052,35 ha. Target penyelesaian lahan kritis di lahan

milik masyarakat pada Tahun 2010 adalah seluas 10.552,70 ha dan pembuatan bangunan sipil teknis sebanyak 385 unit.

Kerusakan lingkungan lainnya ditimbulkan oleh kegiatan usaha pertambangan yang tidak memperhatikan kaidah tata cara penambangan yang baik (*good mining practices*), cenderung berupa penambangan terbuka dan tidak ramah lingkungan. Penambangan terbuka selalu tidak hemat lahan, dan menimbulkan perubahan bentang alam, baik topografi maupun kehidupan di atasnya. Hilangnya kesuburan tanah, buangan (*tailing*) hasil penggalian dan hasil pengolahan (dalam bentuk zat padat, air, atau kimia). Kegiatan pertambangan cenderung merupakan kegiatan skala kecil (penambangan rakyat, areal perusahaan <5 ha), dilakukan secara sederhana. Sampai dengan Desember 2009, dari 30 jenis bahan galian yang terdapat di Jawa Barat, jumlah produksi bahan galian yang dihasilkan adalah sekitar 40.318.342,35 ton.

Kerusakan lingkungan juga ditinjau dari pemanfaatan air bawah tanah untuk keperluan rumah tangga dan komersial (industri, perdagangan dan jasa). Jawa Barat memiliki 15 Cekungan Lintas Kabupaten/Kota, 8 Cekungan Non Lintas (Lokal) dan 4 Cekungan Lintas Provinsi. Kawasan permukiman perkotaan dan industri merupakan pengambil air tanah dengan intensitas tinggi. Intensitas pengambilan air bawah tanah semakin meningkat dari tahun ke tahun, data Tahun 2009 memperlihatkan jumlah perusahaan pengambilan air bawah tanah mencapai 4.700 perusahaan dengan 7.479 titik pengambilan air bawah tanah berijin atau SIPA. Jumlah pengambilan air bawah tanah pada Tahun 2009 tercatat sebesar 175.865.533 M³.

Aplikasi kebijakan air bawah tanah yang diterapkan Pemerintah Provinsi Jawa Barat dalam pengelolaan cekungan air bawah tanah lintas kabupaten/kota, berhasil menerbitkan Rekomendasi Teknis sebagai dasar penerbitan ijin baru maupun daftar ulang bagi pengambilan air bawah tanah di cekungan lintas kabupaten/kota. Pada Tahun 2009 telah diterbitkan sebanyak 411 Rektek, terdiri dari 94 Rektek Baru dan 317 Rektek daftar ulang. Selain itu dilakukan penambahan resapan air ke dalam tanah secara artifisial dengan membangun 5 (lima) percontohan sumur imbuhan di 3 (tiga) cekungan air tanah (CAT) kritis, yaitu CAT Bandung Soreang, CAT Bogor, dan CAT Karawang-Bekasi. Mengingat tingkat kekritisannya cekungan air tanah harus tetap dipelihara, dan semakin meluasnya tutupan lahan di Jawa Barat, perlu dilakukan pembuatan sumur resapan sebagai teknologi penyediaan cadangan air terutama di lokasi kawasan industri yang melakukan proses produksi dengan penggunaan air

dalam jumlah besar. Sosialisasi resapan pada kawasan-kawasan pemukiman yang langka ruang terbuka diharapkan dapat ditempuh melalui aktivitas sosialisasi sadar resapan.

Selain itu, dalam rangka peningkatan pengelolaan dan pengendalian air tanah di 4 (empat) wilayah pelayanan (WP I Cianjur, WP II Purwakarta, WP III Tasikmalaya, WP IV Cirebon) telah dilakukan kegiatan pengendalian pemanfaatan air bawah tanah yang digunakan oleh kegiatan industri dan jasa yang berada di lokasi cekungan air tanah kritis. Hingga Tahun 2009 dari 400 target kegiatan telah terealisasi 544 kegiatan, yang ditindaklanjuti dengan 78 penyegelan, 1 grouting, 475 pernyataan, 28 pemasangan meteran air, 2 perbaikan meteran air, dan 39 legalisasi. Pelaksanaan penyidikan dan penertiban pemanfaatan air bawah tanah perlu ditingkatkan, mengingat masih tingginya tingkat pelanggaran dan dampak lingkungan yang terjadi berupa menurunnya kualitas dan kuantitas air serta amblasan tanah.

Pencemaran dan kerusakan lingkungan sangat dipengaruhi oleh budaya masyarakat yang masih kurang memiliki keinginan dan kesadaran untuk menjaga konservasi lingkungan, kegiatan pembangunan yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan tidak ramah lingkungan, serta lemahnya pengendalian, penertiban dan penegakan hukum terhadap pelanggaran yang mengakibatkan kerusakan lingkungan. Sosialisasi bagi kesadaran masyarakat terhadap perlunya lingkungan yang bersifat ekologis normal, terus dilakukan melalui berbagai upaya pemberdayaan dan publikasi melalui media masa. Kegiatan 2010 dinilai cukup efektif, namun belum mengatasi pencemaran dan kerusakan lingkungan secara langsung, karena dalam hal tindakan pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan harus disertai penerapan dan penegakan hukum yang tegas, melibatkan masyarakat secara langsung, serta dukungan pendanaan yang besar.

5. Mutu dan Kesempatan Pendidikan

Permasalahan yang dihadapi mutu dan kesempatan pendidikan antara lain: penuntasan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun; Rancangan Wajib Belajar 12 Tahun di kabupaten/kota se-Jawa Barat; penyediaan sarana dan prasarana pendidikan yang memadai; serta pembebasan biaya pendidikan khususnya pendidikan dasar; strategi pengembangan dan pengelolaan Sekolah Bertaraf International (SBI); peningkatan kualifikasi pendidikan guru menjadi S1 adalah

menjadi perhatian utama pada Tahun 2010; implementasi Manajemen Berbasis Sekolah (MBS) dan Pendidikan Berbasis Masyarakat (PBM); standarisasi pelayanan pendidikan; pengelolaan data dan informasi pendidikan.

Aspek Pendidikan yang memfokuskan pembangunan pendidikan masyarakat dengan isu strategis mutu dan kesempatan pendidikan dengan permasalahan yang dihadapi antara lain masih rendahnya pencapaian RLS (7,58 tahun) Tahun 2009; sarana prasarana pendidikan belum optimal; infrastruktur pendidikan yang belum memadai. Upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut, melalui kebijakan menuntaskan Jabar bebas buta aksara; mewujudkan Jawa Barat bebas biaya pendidikan dasar dalam rangka penuntasan wajar dikdas Sembilan tahun; mewujudkan Jawa Barat bebas putus jenjang sekolah dalam rangka pelaksanaan wajar dua belas tahun di seluruh Kabupaten/Kota; meningkatkan pengelolaan penjaminan mutu pendidikan dasar dan menengah; meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan anak usia dini (PAUD); meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar sekolah (PLS); meningkatkan pemerataan dan mutu pendidikan luar biasa (PLB); meningkatkan kualitas sarana dan prasarana pendidikan dasar dan menengah; meningkatkan kompetensi dan kesejahteraan guru serta tenaga kependidikan; fasilitasi peningkatan pemerataan dan mutu pendidikan tinggi.

6. Ketersediaan dan Diversifikasi Energi

Permasalahan yang dihadapi ketersediaan dan diversifikasi energi antara lain: kebutuhan energi yang meningkat; Tahun 2010 diperkirakan krisis energi masih menjadi permasalahan utama; konservasi energi perlu terus dilakukan guna menghemat pemanfaatan energi secara keseluruhan; diversifikasi energi perlu terus ditingkatkan melalui pemanfaatan energi alternatif seperti biomassa untuk kebutuhan rumah tangga masyarakat perdesaan; Pengembangan energi PLTMH, surya dan angin; tingginya ketidakseimbangan antara ketersediaan dan kebutuhan konsumsi energi untuk industri dan rumah tangga; struktur pemanfaatan energi primer masih berbasis kepada energi komersial (migas); masih terbatasnya akses masyarakat terhadap sumber daya energi migas, non migas dan listrik; masih rendahnya rasio elektrifikasi; rendahnya kemampuan dan akses masyarakat terhadap infrastruktur energi.

Pada beberapa tempat Jawa Barat sedang mengalami gangguan kekurangan pasokan energi, mengingat konsumsi energi terus meningkat dan berpengaruh

terhadap pasokan listrik dan penggunaan energi secara langsung. Ketergantungan terhadap energi fuel terutama BBM semakin meningkat dan belum mengarah pada konservasi energi atau penggunaan energi secara efektif dan efisien.

Walaupun demikian, potensi energi yang dimiliki Jawa Barat memang sangat besar dan memiliki sumber energi yang bervariasi meliputi migas, air, panas bumi dan energi baru terbarukan. Dari potensi tersebut, yang sudah dibangun dan disambungkan kepada Sistem Jaringan Transmisi Nasional (JTN) Jawa-Bali dengan daya terbangkit dari berbagai pembangkit yang tersebar di 22 lokasi adalah sebesar 4.666,05 MW. Di sisi lain, berdasarkan data yang ada, masyarakat Jawa Barat juga merupakan konsumen energi listrik yang besar dengan laju permintaan yang tinggi mencapai 23.368,35 GWh.

Terkait dengan cakupan infrastruktur dan akses masyarakat perdesaan di Jawa Barat yang mendapat predikat sebagai desa berlistrik sebanyak 6.953 desa (99,74%). Pengembangan Jaringan Listrik PLN yang dilakukan telah dinikmati 65.373 KK yang tersebar di 722 desa. Namun demikian, berdasarkan data yang ada sampai dengan Bulan Desember 2008, terdapat 154.854 kepala keluarga yang tersebar di 16 kabupaten dan 3 kota yang belum menikmati infrastruktur listrik dan dari jumlah tersebut ada 4 desa di Kabupaten Garut dan Cianjur yang belum terjangkau jaringan listrik PLN. Melalui kegiatan pengembangan jaringan listrik perdesaan Tahun 2009, telah dilakukan pembangunan listrik terhadap 12.000 KK yang mendapatkan pemasangan SR/IR. Rasio elektrifikasi di Jawa Barat Tahun 2008 sebesar 64,24%, meningkat menjadi 66,91% di Tahun 2009.

Selain melalui peningkatan cakupan listrik melalui transmisi PLN, dilakukan pula pembangunan Pembangkit Listrik Tenaga Mikrohidro (PLTMH) dan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS). Pembangunan Pembangkit PLTMH di Jawa Barat sampai Tahun 2009 berjumlah 34 unit, dengan total daya yang dapat dibangkitkan sebesar 601,51 kW serta dapat menerangi masyarakat khususnya yang ada di wilayah Selatan Jawa Barat sebanyak 6.339 KK. Sementara itu, melalui pembangunan PLTS, masyarakat yang dapat menikmati infrastruktur listrik baru mencapai 925 KK yang pada umumnya tersebar di Jawa Barat bagian Utara yang meliputi Kabupaten Indramayu, Majalengka dan sebagian kecil di Kabupaten Cianjur dan Tasikmalaya. Pembangunan PLTS ini khususnya dilakukan pada daerah-daerah yang tidak terjangkau oleh jaringan listrik PLN.

Sebaran struktur potensi minyak dan gas (hidrokarbon) utama di Jawa Barat tersebar di lepas pantai (*offshore*) Utara Jawa Barat, dan hanya sebagian kecil saja yang terdapat di daratan (*onshore*) yaitu di Kabupaten Indramayu, Majalengka, Subang, Karawang dan Bekasi. Jumlah sumur yang ada di Jawa Barat terdiri dari *Onshore* sebanyak 194 titik sumur dan *Offshore* sebanyak 670 titik sumur produksi, 170 *platforms* dan 40 Fasilitas *processing and service*.

Dalam rangka menggalakkan pemanfaatan energi alternatif dan pengurangan subsidi BBM, khususnya minyak tanah, antisipasi yang dilakukan sampai Tahun 2009 adalah membangun demplot-demplot biogas sebanyak 1.032 reaktor yang tersebar di 8 kabupaten di Jawa Barat. Selain itu, digalakkan pula konversi minyak tanah ke gas pada beberapa wilayah kabupaten/kota di Jawa Barat secara bertahap dan pengembangan gas kota, khususnya di wilayah Kota Bandung, dan Kabupaten/Kota Cirebon.

Sumberdaya panas bumi Jawa Barat terdapat di 43 lokasi panas bumi di 11 Kabupaten, dengan total potensi mencapai 6.101 MW. Total potensi yang sudah dimanfaatkan menjadi energi listrik pada Tahun 2009 adalah sebesar 1073 MW melalui PLTP Kamojang (226 MW), PLTP Awibengkok Gunung Salak (354 MW), PLTP Drajat (145 MW) dan PLTP Wayang Windu (227 MW). Prospek pengembangan potensi panas bumi berguna bagi pembangkit listrik khususnya untuk keperluan industri. Dalam hal ini Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah berhasil memfasilitasi pengembangan dan pengusahaan (operasi) panas bumi di lapangan-lapangan eksisting sehingga dapat meningkatkan kapasitas pembangkit yang ada. Selain itu, pada Tahun 2008 Pemerintah Provinsi Jawa Barat telah melakukan Pelelangan Wilayah Kerja Panas Bumi (WKP) untuk lokasi Tangkuban Perahu dan Cisolok – Cisukarame yang saat ini sudah ditetapkan pemenang lelangnya untuk pengembangan 3 lokasi WKP panas bumi tersebut.

7. Ketahanan Pangan

Permasalahan yang dihadapi bidang ketahanan pangan antara lain: tidak seimbangnya laju peningkatan produksi dan kebutuhan konsumsi; Rendahnya sebagian besar ketersediaan bahan pangan pokok diluar padi; rendahnya daya beli masyarakat terhadap pemenuhan kebutuhan bahan pangan pokok; masih lemahnya kemandirian produksi bahan pangan; tingginya ketergantungan pangan pokok terhadap beras; tingginya wilayah rawan pangan (25,3% di Jawa Barat); masih

tingginya proporsi kehilangan hasil pada penanganan pascapanen (>15%); penganekaragaman/diversifikasi pangan masih rendah, skor PPH belum mencapai angka ideal; rendahnya pengendalian mutu dan keamanan pangan; sistem distribusi pangan yang belum efisien; perkembangan harga yang masih sangat fluktuatif dan cenderung meningkat; masih lemahnya dukungan infrastruktur produksi pangan; masih lemahnya ketersediaan input produksi pertanian.

Ketahanan pangan dimaknai sebagai kondisi terpenuhinya pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari tersedianya pangan yang cukup baik jumlah maupun mutunya, aman, merata, dan terjangkau bagi setiap individu. Kebutuhan akan pangan semakin meningkat seiring dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk.

Kondisi ketahanan pangan dapat dicirikan dengan terpenuhinya komoditas pangan pokok di masyarakat Jawa Barat, dimana kebutuhan karbohidrat asal beras merupakan kebutuhan utama bagi masyarakat Jawa Barat, disamping kebutuhan pangan lainnya yang juga harus dipersiapkan. Seiring dengan perkembangan jumlah penduduk, perkembangan luasan lahan, kebijakan penataan ruang serta aktivitas sosial ekonomi masyarakat yang terus berkembang, pada gilirannya akan menjadi faktor dalam pemenuhan ketersediaan bahan pangan.

Kerawanan pangan juga terjadi dalam musim kekeringan yang berlangsung panjang diperdesaan atau disebabkan terjadinya banjir di wilayah-wilayah yang mengalami bencana genangan.

8. Optimalisasi Pemanfaatan Ruang untuk Investasi

Permasalahan yang dihadapi dalam optimalisasi pemanfaatan ruang untuk investasi antara lain: belum optimalnya pengembangan objek strategis yang memiliki peluang investasi, seperti: pembangunan bandara, pelabuhan laut, pengairan, angkutan massal, serta pengembangan energi panas bumi, pariwisata, agribisnis, bisnis kelautan, dan industri; masih adanya konflik pemanfaatan ruang terkait dengan kebutuhan ruang untuk investasi terhadap penetapan 45% kawasan lindung.

Dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan ruang untuk investasi di Jawa Barat, kepentingan ekonomi diwujudkan dalam pengembangan kawasan industri dan Kawasan Strategis Provinsi (KSP). Pengembangan kawasan industri meliputi :

1. Kawasan Industri MM2100 Industrial Town, terletak di Cibitung Kabupaten Bekasi;
2. Kawasan Industri EJIP (NEGAI), terletak di Cikarang, Cibarusah Kabupaten Bekasi;
3. Kawasan Industri Bekasi International Industrial Estate, terletak di Desa Sukaresmi, Kabupaten Bekasi;
4. Kawasan Industri Jababeka terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi;
5. Kawasan Industri Lippo Cikarang Industrial Park, terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi;
6. Kawasan Industri Patria Manunggal Jaya Industrial Estate, terletak di Cikarang, Kabupaten Bekasi;
7. Kawasan Industri Gobel, terletak di Cibitung, Kabupaten Bekasi;
8. Kawasan Industri Marunda Centre-International Warehouse and Industrial Estate, terletak di Kabupaten Bekasi;
9. Kawasan Industri Sentul, terletak di Kabupaten Bogor; dan
10. Kawasan Industri Cibinong Centre Industrial Estate, terletak di Citeureup-Cileungsi-Klapanunggal-Gunungputri, Kabupaten Bogor.
11. Kawasan Industri KIIC, terletak di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;
12. Kawasan Industri Taman Niaga Karawang Prima, terletak di Kecamatan Teluk Jambe, Kabupaten Karawang;
13. Kawasan Industri Indotaisei Kota Bukit Indah, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
14. Kawasan Industri Kujang Cikampek, terletak di Kecamatan Cikampek, Kabupaten Karawang;
15. Kawasan Industri Mandalapratama Permai, terletak di Kecamatan Cikampek Kabupaten Karawang;
16. Kawasan Industri Mitrakarawang, terletak di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
17. Kawasan Industri Karawang 2000 Industrial Estate, terletak di Kabupaten Karawang;
18. Kawasan Industri Suryacipta City of Industry, terletak di Kecamatan Ciampel, Kabupaten Karawang;
19. Kawasan Industri Kota Bukit Indah-Industrial City, terletak di Kabupaten Karawang dan Kabupaten Purwakarta; dan

20. Kawasan Industri Lion, terletak di Kecamatan Campaka, Kabupaten Purwakarta.
21. Pengembangan Kawasan Industri Kertajati Aerocity di Kabupaten Majalengka.
22. Pembangunan Kawasan Industri Ciambar di Kabupaten Sukabumi.
23. Optimalisasi Kawasan Industri Rancaekek, terletak di Kabupaten Sumedang dan Kabupaten Bandung

Kawasan strategis provinsi (KSP) merupakan kawasan yang penataan ruangnya diprioritaskan karena memiliki pengaruh sangat penting secara regional. KSP dalam aspek ekonomi meliputi :

1. KSP Pangandaran dan sekitarnya,
2. KSP Sukabumi bagian selatan,
3. KSP koridor Bekasi-Cikampek,
4. KSP koridor Purwakarta-Padalarang,
5. KSP pertanian berlahan basah dan beririgasi teknis Pantura Jawa Barat,
6. KSP Bandara Internasional Jawa Barat dan Kertajati Aerocity,
7. KSP koridor Bandung-Cirebon,
8. KSP perbatasan Jawa Barat-Jawa Tengah, dan
9. KSP kilang minyak Balongan.

Dalam rangka mendukung pengembangan ruang investasi tersebut telah direncanakan infrastruktur strategis sebagai wujud struktur ruang di Jawa Barat, yang terdiri dari pembangunan dan peningkatan infrastruktur jalan dan perhubungan (jalan tol, bandar udara, pelabuhan), infrastruktur sumberdaya air (waduk dan irigasi), infrastruktur energi (migas dan panas bumi), dan infrastruktur permukiman. Optimalisasi pengembangan infrastruktur strategis tersebut belum sepenuhnya terwujud karena masih dalam tahap perencanaan dan pembebasan lahan, namun kebijakan dalam mendukung pengembangan ruang investasi tersebut menjadi salah satu sasaran dari tujuan penataan ruang di Jawa Barat. Telah dilaksanakan pula upaya-upaya pengendalian pembangunan tata ruang wilayah agar memenuhi persyaratan arsitektur ruang yang berwawasan lingkungan di proyeksikan ke depan.

9. Intensitas dan Penyebaran Penyakit

Penanggulangan penyebaran penyakit menular dan tidak menular sangat erat kaitannya dengan perilaku hidup bersih dan sehat. Hal ini terlihat dari masih tingginya kasus-kasus penyakit berbasis lingkungan, seperti: Demam Berdarah, TBC, Filariasis, Flu Burung, Diare, Malaria, dan sebagainya. Adanya perubahan gaya hidup masyarakat saat ini mengakibatkan meningkatnya prevalensi kasus-kasus penyakit tidak menular, seperti: Penyakit Jantung, Diabetes, Stroke, dan lain-lain. Sementara itu berdasarkan hasil Riskesdas 2007 dinyatakan bahwa Jawa Barat menempati peringkat satu untuk angka penderita gangguan mental emosional, yaitu 20%, diatas angka rata-rata nasional yang hanya sebesar 11%. Masalah lain adalah tingginya penyalahgunaan NAPZA, yang erat kaitannya dengan prevalensi HIV/AIDS di Jawa Barat dimana mulai tahun 2008 sampai saat ini selalu menduduki peringkat pertama terbanyak penderita HIV/AIDS.

10. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat.

Permasalahan yang dihadapi dalam perilaku hidup bersih dan sehat antara lain: masih rendahnya kesadaran untuk berperilaku hidup sehat dikalangan masyarakat, seperti: kebiasaan merokok, pola konsumsi makanan yang tidak cukup gizi dan seimbang, menjaga kebersihan diri, serta kurang berolahraga; keterbatasan sarana-prasarana penunjang perilaku hidup bersih dan sehat, seperti: MCK, lapang olah raga, tempat sampah, dan drainase, penyediaan air minum bersih upaya yang dilakukan untuk mengatasi permasalahan tersebut.

Fokus pembangunan masyarakat pada perilaku hidup bersih dan sehat melalui strategi pengembangan fasilitas dan penyusunan regulasi yang berkaitan dengan kesehatan adalah: peningkatan layanan kesehatan, derajat kesehatan ibu dan anak, dan pembudayaan perilaku hidup bersih dan sehat.

11. Investasi Daerah dan Pembiayaan KUMKM

Permasalahan yang dihadapi bidang investasi daerah dan pembiayaan KUMKM antara lain: belum efektifnya regulasi yang berkaitan dengan penanaman modal; belum kondusifnya aspek keamanan, dan penegakkan hukum; belum tersedianya informasi akurat yang dibutuhkan calon investor; masih terdapatnya kecenderungan ekonomi biaya tinggi dalam pelaksanaan investasi.

12. Pengarusutamaan Gender

Pembangunan jender di Jawa Barat dihitung berdasarkan Angka Indeks Pembangunan Jender (IPJ) yang mengukur tingkat pencapaian dalam kemampuan dasar dan Indeks Pemberdayaan Jender (IDJ). Angka IPJ dan IDJ Jawa Barat masih dibawah angka nasional. Pada tahun 2007 IPJ Jawa Barat 61,4 (Nasional 65,8) dan IDJ Jawa Barat 53,3 (Nasional 62,1). Indikator yang dihitung dalam IPJ tersebut adalah Angka Harapan Hidup (AHH), Angka Melek Huruf (AMH), Rata-rata Lama Sekolah (RLS), dan Jumlah Angkatan Kerja. Sedangkan untuk IDJ, dihitung berdasarkan jumlah wanita di parlemen, perempuan yang menjadi pejabat tinggi, manajer, dan posisi staf teknis, serta angkatan kerja wanita. Pencapaian angka tersebut menunjukkan bahwa orientasi pembangunan Jawa Barat belum responsif jender.

13. Ketersediaan Lapangan Pekerjaan

Permasalahan yang dihadapi bidang ketenagakerjaan adalah ketidakseimbangan antara ketersediaan kompetensi tenaga kerja dengan kebutuhan lapangan pekerjaan di Jawa Barat; belum meratanya peluang serta rendahnya aksesibilitas kesempatan kerja pada berbagai sektor unggulan yang sesuai dengan sebagian besar kondisi kompetensi sumber daya manusia tenaga kerja Jawa Barat; kurangnya minat investasi terhadap sektor-sektor tertentu, seperti : pertanian dan industri kecil; rendahnya kompetensi tenaga kerja yang bersertifikat standar internasional; kurangnya kerjasama pemerintah dan swasta.

14. Peran Budaya dan Kearifan Lokal serta Kepariwisata dalam Pembangunan.

Permasalahan yang dihadapi dalam peran budaya dan kearifan lokal serta kepariwisataan dalam pembangunan antara lain: kurangnya program paket wisata yang menawarkan untuk menjangkau sebagian besar obyek wisata jarak antara obyek wisata yang satu dan lain yang berjauhan menjadi masalah dan lama tinggal (*length of stay*) wisatawan masih pendek yaitu 1-2 hari; kurangnya inovasi pengembangan produk wisata, terutama dalam pengemasan; rendahnya kualitas sarana dan prasarana penunjang kegiatan pariwisata seperti jalan, hotel dan fasilitas umum lainnya; kurangnya aktivitas atau kegiatan wisata yang dapat menarik

pengunjung; belum optimalnya pemanfaatan teknologi informasi kepariwisataan;
rendahnya sadar wisata.